



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komunikasi merupakan alat yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Komunikasi menentukan suatu hubungan antara pribadi dengan orang lain baik itu dalam hal berbicara secara personal ataupun mengemukakan pendapat kepada banyak orang. Komunikasi antara sesama manusia dapat dilihat dalam arti luas seperti interaksi satu kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut Fiske (2016:1) komunikasi adalah salah satu aktivitas manusia yang dikenali oleh semua orang namun sangat sedikit yang dapat mendefinisikannya secara memuaskan. Komunikasi sendiri memiliki definisi yang tidak terhitung seperti saling berbicara, dan penyebaran informasi.

Berbagai macam pekerjaan menjadikan komunikasi sebagai hal terpenting yang sangat dikedepankan dalam menjalankan tugasnya salah satunya adalah Hubungan Masyarakat (Humas). Humas merupakan sebuah komunikasi untuk menciptakan citra positif dari suatu organisasi atau instansi negeri atau swasta untuk menghormati kepentingan bersama.

Pembentukan humas instansi berfungsi untuk menginformasikan dan menyebarluaskan kebijakan internal yang telah dibuat kepada khalayak publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambil keputusan. Menurut Suprawoto (2018:48) humas pemerintahan merupakan fungsi manajemen yang membantu organisasi merumuskan tujuan organisasi serta membantu organisasi beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Humas dalam instansi pemerintahan atau perusahaan swasta banyak dibutuhkan, terbukti dengan pesatnya perkembangan humas di Indonesia, salah satunya adalah humas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi pemerintah Indonesia yang membidangi segala urusan yang berkaitan dengan hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia secara langsung. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Salah satu kegiatan yang dilakukan bidang humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan peliputan dan dokumentasi. Peliputan merupakan suatu pengambilan informasi secara langsung yang nantinya menjadi sebuah sumber yang dapat dipercaya. Prosesnya merupakan pemantauan langsung dan pencatatan suatu peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah narasumber.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari topik yang dibahas yakni sebagai berikut:

- 1) Apa saja tugas bidang humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?
- 2) Bagaimana proses peliputan dan dokumentasi humas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?
- 3) Apa hambatan dan solusi yang dihadapi humas pada saat proses peliputan dan dokumentasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dalam Laporan Akhir ini yaitu:

- 1) Menjelaskan tugas bidang humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Menjelaskan proses peliputan dan dokumentasi humas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Menjelaskan hambatan dan solusi yang dihadapi humas pada saat proses peliputan dan dokumentasi.

METODE

Lokasi dan Waktu PKL

Pengumpulan data yang diperlukan untuk membuat laporan akhir ini dilakukan di Kantor Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Hr. Rasuna Said KAV 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, Gedung Sentra Mulia Lantai 6 yang mulai terhitung sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 7 April 2022. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai hari kerja yaitu Senin hingga Jumat yang dimulai pukul 07.30-16.00 WIB. Selain itu jam kerja bidang Humas Kemenkumham juga disesuaikan dengan kebutuhan peliputan dan pencarian berita yang dilakukan meliputi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Data dan Instrumen

Data dan instrumen merupakan dua hal penting yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Data merupakan sumber yang didapatkan baik secara langsung dilapangan maupun secara tidak langsung yang dapat dijadikan landasan untuk segala permasalahan yang dibahas, sedangkan instrumen merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperoleh data yang ada pada saat praktik kerja lapangan berlangsung.

Data dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data untuk Laporan Akhir ini adalah:

- 1) Data Primer
Data primer merupakan suatu data atau informasi yang diperoleh atau di dapatkan secara langsung. Data primer pada laporan akhir ini didapatkan melalui wawancara dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Kepala Sub Bidang Peliputan dan Dokumentasi, Pranata Hubungan Masyarakat, Staff Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, dan Pengawal Pribadi.
- 2) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data yang diambil dari referensi, karya ilmiah, buku, dan internet yang semuanya mengacu dengan materi yang terkait untuk penulisan laporan akhir.